

**Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan  
(Study Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda)**

**Muhammad Rezha Rahman, Bambang Irawan**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 4, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan (Study Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda).

Pengarang : Muhammad Rezha Rahman

NIM : 1902016062

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Desember 2025  
**Pembimbing,**



29/26

**Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si**  
NIP 19760216 200501 1 002

*Bagian di bawah ini*

### **DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

**Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik**

**Volume : 13**

**Nomor : 4**

**Tahun : 2025**

**Halaman : 1107-1122**

## **Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan (Study Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda)**

**Muhammad Rezha Rahman<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Pertumbuhan transportasi dari waktu ke waktu kian pesat, meningkatnya jumlah kendaraan maka bertambah pula kebutuhan akan lahan parkir. Pasar segiri memiliki permasalahan parkir liar yang harus di tangani dikarenakan sangat berdampak pada kegiatan berlalu lintas. Dinas Perhubungan harus memiliki strategi yang dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran parkir liar di Pasar Segiri Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan parkir liar serta mencari strategi yang dapat dilakukan demi menyelesaikan permasalahan parkir liar di Pasar Segiri Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis pendekatan deskriptif yang berfokus pada strategi penertiban parkir liar yang terdiri dari, sosialisasi program, pengawasan atau pemantauan program dan faktor penghambat dalam menertibkan parkir liar di Pasar Segiri Samarinda. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dari strategi penertiban parkir liar di Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda ialah dari segi sosialisasi telah berjalan dengan baik yang tertuju pada masyarakat namun perlu ditingkatkan lagi. Pada indikator pengawasan tidak berjalan dengan efektif dikarenakan masih terdapat pelanggaran parkir liar yang terjadi akibat terbatasnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sehingga tidak dapat berjalan dengan baik. Pada indikator faktor penghambat, kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktornya dikarenakan banyak upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda seperti pemasangan papan informasi namun masih banyak masyarakat yang parkir di area yang dilarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi penertiban parkir liar di Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak efektif.*

**Kata Kunci :** Kebijakan Publik; Strategi; Parkir Liar

### **Pendahuluan**

Transportasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern dan kebutuhannya cenderung terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah. Secara konseptual,

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rezhaharman95@gmail.com](mailto:rezhaharman95@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

transportasi dipahami sebagai sarana yang digunakan untuk memindahkan manusia maupun barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan memanfaatkan kendaraan yang dioperasikan oleh tenaga manusia maupun mesin. Keberadaan sistem transportasi bertujuan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor kehidupan. Dari sisi ekonomi, transportasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan nilai jual barang melalui distribusi yang lebih cepat dan merata antarwilayah. Jaringan transportasi yang luas dan terintegrasi mampu memperlancar arus distribusi barang kepada konsumen di luar daerah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, transportasi juga berkontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui kemudahan mobilisasi manusia dan pengiriman material konstruksi ke berbagai wilayah (Seno, 2020).

Seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan transportasi, kebutuhan akan fasilitas pendukung, khususnya lahan parkir, menjadi semakin mendesak. Penyediaan lahan parkir merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Oleh karena itu, aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan fasilitas parkir, seharusnya menjadi prioritas pemerintah guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkeadilan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).

Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya praktik parkir liar. Parkir liar umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas parkir yang tersedia, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir yang berlaku. Praktik parkir ilegal ini sering memanfaatkan badan jalan sebagai alternatif lahan parkir, sehingga menyebabkan penyempitan jalan dan kemacetan lalu lintas yang merugikan pengguna jalan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun transportasi memberikan banyak manfaat, namun tanpa pengelolaan yang baik, transportasi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban dan kenyamanan ruang publik (Apakabar.com, 2021).

Fenomena parkir liar juga terjadi secara signifikan di Kota Samarinda. Berdasarkan data Kaltimtoday (2022), Kota Samarinda memiliki jumlah penduduk sebanyak 766.015 jiwa dengan total kendaraan mencapai 898.838 unit

yang terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang, bus, kendaraan khusus, dan kendaraan angkutan barang. Tingginya jumlah kendaraan tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir di berbagai destinasi aktivitas masyarakat, sehingga memicu maraknya parkir liar. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas pelayanan parkir dan kurangnya pemahaman sebagian pihak terhadap regulasi perparkiran, termasuk tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang dalam praktiknya masih sering dilanggar (Korankaltara.com, 2022).

Secara umum, kegiatan parkir terbagi menjadi dua jenis, yaitu parkir di luar badan jalan (off-street parking) dan parkir di badan jalan (on-street parking). Parkir di badan jalan memiliki potensi permasalahan yang lebih besar, terutama ketika dilakukan secara ilegal. Parkir legal ditandai dengan keberadaan petugas resmi yang memiliki atribut, surat tugas, serta kewajiban menyetorkan hasil retribusi kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah. Sebaliknya, parkir ilegal dilakukan oleh juru parkir liar tanpa izin resmi, tanpa atribut, dan hasil pungutannya tidak disetorkan kepada pemerintah daerah, sehingga tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mengurangi potensi pendapatan daerah (Apakabar.com, 2021).

Berbagai kasus parkir liar di Kota Samarinda menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat berulang dan belum tertangani secara tuntas. Parkir liar ditemukan di sekitar pusat perbelanjaan seperti Samarinda Central Plaza, gerai-gerai minimarket, kawasan wisata Tepian Mahakam, hingga Pasar Segiri sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kemacetan lalu lintas, tetapi juga ketidaknyamanan, intimidasi, dan keresahan masyarakat. Meskipun Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya penertiban, seperti razia, penandatanganan surat pernyataan, penangkapan juru parkir liar, serta sosialisasi kepada masyarakat, praktik parkir ilegal masih terus terjadi di sejumlah lokasi strategis (Seno, 2020; Kaltim.Akurasi.id, 2023; Kompasiana.com, 2023; Korankaltim.com, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan parkir liar di Kota Samarinda tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas parkir, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Parkir liar kerap dianggap sebagai persoalan sepele, padahal dampaknya sangat signifikan terhadap kelancaran lalu lintas, kenyamanan aktivitas masyarakat, dan estetika kawasan perkotaan, khususnya di Pasar Segiri Samarinda. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan parkir liar. Strategi tersebut perlu dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada agar upaya penertiban dapat berjalan secara efektif dan efisien. Atas dasar itulah penelitian ini difokuskan pada analisis strategi penertiban parkir

liar oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda di Pasar Segiri Samarinda dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Pelayanan Publik***

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa. Pelayanan pada hakikatnya adalah tindakan individu atau organisasi dalam memberikan manfaat kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Loina (2001) mendefinisikan pelayanan sebagai proses pembentukan citra organisasi melalui komunikasi dan interaksi dengan publik, sedangkan Grönroos (1990) memandang pelayanan sebagai aktivitas tidak berwujud yang muncul akibat interaksi antara pemberi dan penerima layanan. Dalam konteks Indonesia, pelayanan publik secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.

#### ***Strategi***

Strategi merupakan konsep penting dalam manajemen organisasi, khususnya dalam merespons dinamika lingkungan eksternal. Chandler (1962) mendefinisikan strategi sebagai penetapan tujuan jangka panjang organisasi, diikuti dengan penyusunan program tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Sudianti (2022) menyatakan bahwa strategi dikembangkan untuk membentuk respons organisasi terhadap perubahan lingkungan yang relevan, sementara Sriyono dan Hermawan (2020) menekankan bahwa strategi adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya, kapabilitas, peluang, dan risiko. Amir (2011) menegaskan bahwa suatu keputusan dapat disebut strategis apabila bersifat penting, berdampak luas, dan jarang dibuat. Dalam konteks Dinas Perhubungan, strategi penertiban parkir liar merupakan keputusan strategis karena berdampak langsung pada ketertiban lalu lintas dan kualitas pelayanan publik.

#### ***Parkir***

Parkir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi perkotaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti dan ditinggalkan pengemudinya untuk jangka waktu tertentu. Parkir ilegal atau parkir liar adalah kegiatan parkir yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir dan berada di luar pengawasan pemerintah. Keberadaan parkir liar berdampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta mengurangi potensi pendapatan daerah (Maghfirah, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan pengawasan yang tegas dari pemerintah daerah dalam mengelola parkir, khususnya parkir di tepi jalan umum.

### ***Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda***

Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sektor perhubungan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 49 Tahun 2016, Dinas Perhubungan bertugas mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan transportasi. Fungsi tersebut mencakup pengelolaan angkutan, pengendalian lalu lintas, pengawasan fasilitas perhubungan, serta pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis. Dalam konteks pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban lalu lintas dan memberikan pelayanan parkir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### ***Analisis SWOT***

Analisis SWOT merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal suatu organisasi. Menurut Hendra (2022), analisis SWOT bertujuan untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis ini memungkinkan perumusan strategi yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan kondisi objektif organisasi serta lingkungan yang memengaruhinya. Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk menganalisis strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas kebijakan penertiban.

### ***Definisi Konseptual***

Definisi konseptual dalam penelitian ini merujuk pada maraknya praktik parkir liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan berdampak pada terganggunya ketertiban lalu lintas serta kenyamanan pengguna jalan. Parkir liar dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perparkiran yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penertiban sebagai rencana dasar yang dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda guna mengendalikan dan mengurangi praktik parkir liar. Strategi tersebut berfungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan dan tindakan operasional dalam rangka mewujudkan ketertiban lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

### ***Metode Penelitian***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan parkir liar di Pasar Segiri, serta merumuskan alternatif strategi penertiban yang efektif berdasarkan hasil analisis SWOT.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam, sistematis, dan faktual sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan SWOT. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu menghimpun seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap kedua adalah reduksi data, yakni proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data agar sesuai dengan tujuan penelitian, serta mengeliminasi data yang tidak relevan.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau bagan agar memudahkan penarikan makna dan pemahaman hubungan antar data. Tahap terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka teori untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis SWOT digunakan untuk mengontraskan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman (Nisak, 2013). Seluruh tahapan analisis data dilakukan secara sistematis untuk memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wilayah Kota Samarinda yang terbilang luas dan padat penduduk, membuat pemerintah berfokus pada kegiatan lalu lintas masyarakat yang cukup ramai akan kendaraan serta pemerintah perlu melakukan pembagian tugas kepada Dinas Perhubungan di beberapa wilayah yang ada di Kota Samarinda. Berikut jumlah penduduk sesuai dengan kecamatan yang ada di Kota Samarinda:

**Tabel 1 Jumlah penduduk Kota Samarinda**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Palaran	68,600
2	Samarinda Ilir	69,400
3	Samarinda Kota	34,700
4	Sambutan	58,100
5	Samarinda Sebrang	66,300
6	Loa Janan Ilir	68,100
7	Sungai Kunjang	68,100
8	Samarinda Ulu	140,000
9	Samarinda Utara	107,000
10	Sungai Pinang	106,300
	Jumlah	858,100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (2025)

Kota Samarinda memiliki total penduduk yang terbilang cukup besar yakni berjumlah sekitar 858,100 jiwa, dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Samarinda memberi dampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dikutip pada *website dashboard Electronic Registration Identification* Korlantas Polri, jumlah kendaraan menurut POLDA Kalimantan Timur pada tahun 2024 Kota Samarinda memiliki total kendaraan tertinggi yakni sebanyak . Adapun total data jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Timur sebagai berikut :

Gambar 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Samarinda

JUMLAH DATA KENDARAAN POLD A KALIMANTAN TIMUR								
NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
1	SAMARINDA	101.872	1.848	60.948	851.892	707	1.017.267	28,17
2	BALIKPAPAN	109.697	2.571	61.923	621.705	1.026	796.873	22,07
3	KUTAI KARTANEGARA	40.037	521	29.982	551.522	402	622.464	17,24
4	KUTAI TIMUR	27.003	582	21.416	237.297	274	286.575	7,94
5	PASER	13.991	341	13.368	213.091	189	240.971	6,67
6	BERAU	14.143	515	11.972	171.624	267	198.521	5,50
7	BONTANG	22.237	640	8.605	146.179	108	177.769	4,92
8	KUTAI BARAT	9.943	132	8.685	130.041	139	148.940	4,12
9	PENAJAM PASER UTARA	7.286	218	7.724	105.828	121	121.236	3,36
10	MAHKAM ULU	24	0	41	276	6	347	0,01
11	(TAK DIISI)	13	0	2	201	0	216	0,01
12	BALIKPAPAN	0	0	0	9	0	9	0,00
13	SAMARINDA	0	0	0	7	0	7	0,00
14	BERAU	0	0	1	5	0	6	0,00
15	BONTANG	0	0	0	1	0	1	0,00
16	KUTAI KARTANEGARA	0	0	0	1	0	1	0,00
17	MAHKAM ULU	0	0	0	1	0	1	0,00
TOTAL		346.246	7.368	224.355	3.029.680	3.238	3.611.204	

Last update : 2024-12-04 22:43:17

Sumber : *Electronic Registration Identification* (ERI), Korlantas Polri, 2024

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peningkatan jumlah kendaraan di Kota Samarinda memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lalu lintas, khususnya di kawasan Pasar Segiri. Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang paling dominan ditemukan adalah praktik parkir liar, yaitu kegiatan memarkir kendaraan di area yang tidak diperuntukkan sebagai lahan parkir. Praktik ini terjadi hampir di seluruh titik strategis Pasar Segiri, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari, sehingga menimbulkan kemacetan, penyempitan badan jalan, serta ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

#### **Analisis SWOT Penertiban Parkir Liar di Pasar Segiri oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda**

Analisis SWOT digunakan sebagai pendekatan strategis untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan parkir liar di Pasar Segiri. Analisis ini mencakup empat komponen utama, yaitu kekuatan (*strength*),

kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Melalui analisis ini, dapat dirumuskan strategi penertiban parkir liar yang lebih efektif dan kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan.

### 1. *Strength* (Kekuatan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung pelaksanaan penertiban parkir liar di Pasar Segiri. Salah satu kekuatan utama adalah adanya dasar hukum dan kewenangan yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015. Regulasi tersebut memberikan legitimasi kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan tindakan penertiban, mulai dari teguran, penggembosan ban, penguncian roda, hingga penderekan kendaraan yang melanggar aturan.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Samarinda didukung oleh personel yang telah mendapatkan pelatihan teknis sebelum diterjunkan ke lapangan, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dan penertiban secara profesional. Pemanfaatan teknologi berupa CCTV yang telah terpasang di kawasan Pasar Segiri juga menjadi kekuatan penting dalam memantau pelanggaran lalu lintas secara real-time. Di samping itu, kerja sama lintas instansi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian memperkuat efektivitas penertiban di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Karim (2022) dan Iksan (2023) yang menegaskan bahwa kewenangan hukum dan kolaborasi antarinstansi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penertiban parkir liar.

### 2. *Weakness* (Kelemahan)

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah kelemahan yang menghambat efektivitas penertiban parkir liar di Pasar Segiri. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama, mengingat luasnya area pasar dan tingginya intensitas aktivitas masyarakat. Jumlah personel yang ditugaskan tidak sebanding dengan besarnya wilayah pengawasan, sehingga pengawasan dan penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rahmawan (2022) dan Lumbanbatu (2019) yang menyatakan bahwa keterbatasan personel berdampak langsung pada lemahnya pengawasan lalu lintas.

Kelemahan lainnya adalah penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun pengawasan telah dilakukan, pelanggaran parkir liar masih terus terjadi, menunjukkan bahwa efek jera terhadap pelanggar belum tercapai. Kinerja pengawasan yang kurang optimal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan personel, tingginya volume kendaraan, serta padatnya aktivitas pasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Munadi (2024) dan Rahmawati (2018) yang menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan

keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama tidak efektifnya penegakan hukum parkir liar.

Selain itu, keterbatasan lahan parkir resmi di Pasar Segiri juga menjadi kelemahan struktural yang mendorong masyarakat untuk melakukan parkir liar. Minimnya fasilitas parkir memaksa pengendara memanfaatkan badan jalan, yang berdampak langsung pada kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan penelitian Andre (2017) dan Bere (2015) yang menyatakan bahwa keterbatasan lahan parkir merupakan penyebab utama terjadinya parkir liar di kawasan pasar tradisional.

### 3. Opportunities (Peluang)

Hasil penelitian menunjukkan adanya peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk meningkatkan efektivitas penertiban parkir liar di Pasar Segiri. Salah satu peluang utama adalah pengembangan pemanfaatan teknologi pengawasan berupa CCTV. Penambahan jumlah dan cakupan CCTV dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemantauan, mempercepat identifikasi pelanggaran, serta memberikan efek preventif bagi pengguna jalan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan (2019) dan Oktavianus (2024) yang menegaskan bahwa teknologi pengawasan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas.

Peluang lainnya adalah pemberdayaan juru parkir lokal melalui sistem rekrutmen dan pembinaan resmi. Strategi ini tidak hanya berpotensi mengurangi praktik parkir liar, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan pelayanan parkir yang lebih tertib dan profesional. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurmagfirah (2019) yang menyatakan bahwa pembinaan juru parkir liar menjadi juru parkir resmi merupakan strategi efektif dalam penataan perparkiran.

### 4. Threat (Ancaman)

Ancaman utama dalam penertiban parkir liar di Pasar Segiri adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat, yang tidak diimbangi dengan penambahan lahan parkir. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Dinas Perhubungan dalam mengendalikan pelanggaran parkir liar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadhan (2024) yang menyebutkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan ketersediaan lahan parkir merupakan faktor dominan penyebab parkir liar.

Ancaman lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pemasangan rambu larangan, sebagian masyarakat masih menganggap parkir liar sebagai hal yang sepele. Selain itu, Pasar Segiri sebagai pusat aktivitas ekonomi dengan kepadatan tinggi juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban lalu lintas, sebagaimana dikemukakan oleh Zakariah (2021).

### ***Strategi Penertiban Parkir Liar di Pasar Segiri***

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi parkir liar di Pasar Segiri namun tidak berjalan dengan efektif maka dari itu penulis menyarankan beberapa strategi yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan keberhasilan dalam penertiban parkir liar di Pasar Segiri Samarinda, yaitu:

#### **1. Penambahan petugas dishub dalam melaksanakan penjagaan**

Dengan minimnya petugas dishub yang melakukan penjagaan mengakibatkan penertiban parkir liar sulit untuk dilaksanakan dengan maksimal di dorong dengan area pasar yang luas serta pertumbuhan kendaraan yang pesat mengakibatkan meningkatnya pelanggaran yang terjadi, maka dari itu dengan menambah petugas untuk melaksanakan penjagaan lalulintas dapat memperingkatkan penertiban parkir liar yang dilakukan dan meningkatkan efektivitas penjagaan lalulintas Pasar Segiri Samarinda. Ini sejalan dengan hasil penelitian Nurmaghfirah (2019), yang menyimpulkan bahwa pengawasan masih kurang efektif dan berjalan dengan baik disebabkan dari segi kurangnya petugas pengawasan dari Dinas Perhubungan maupun kurang tegasnya petugas pengawasan di lapangan terhadap penyelenggara parkir yang melanggar. Dari hasil serta pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan kurangnya petugas dishub yang melakukan pengawasan dan penjagaan dapat mempengaruhi keberhasilan penertiban parkir liar maka dengan menambah petugas yang melakukan penjagaan dapat meningkatnya keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan parkir liar di Pasar Segiri Samarinda.

#### **2. Meluaskan area penjagaan dan pengawasan**

Sebagai pusat pasar terbesar di Samarinda menjadikan Pasar Segiri tempat yang akan selalu dipadati oleh masyarakat maupun yang ingin melakukan aktivitas jual beli maupun hanya untuk mengakses jalannya saja, Pasar Segiri memiliki area yang sangat luas serta memiliki akses jalan yang sangat banyak maka dari itu tidak dapat dipungkiri pelanggaran lalu lintas seperti parkir liar kerap terjadi di seluruh area pasar. Dinas Perhubungan sendiri telah mengerahkan sekitar empat hingga lima anggota untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di area Pasar Segiri, namun untuk dari hasil penelitian yang di teliti saat ini dishub hanya melakukan penjagaan di bagian depan pasar dan di bagian belakang saja maka dari itu masih terdapat banyak sekali pelanggaran parkir liar terjadi yang tidak masuk di radar penjagaan Dishub, maka dari itu pentingnya melakukan penjagaan yang menyeluruh, ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Karim (2022) tentang Kewenangan Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menyimpulkan bahwa efektifitas Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melakukan Penegakan

dan penertiban hukum sangat dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya merasa terganggu dengan kemacetan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, sedikit demi sedikit telah terselesaikan. Karena Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya khususnya dalam upaya melaksanakan ketertiban lalu lintas dijalan. Personil yang melakukan tugasnya khususnya di tempat-tempat rawan pelanggaran yakni Kawasan tanah abang, melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala setiap jamnya, sehingga Ketika ditemukan hambatan langsung dilakukan penanganan.

Dari Hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya melakukan penjagaan oleh petugas Dishub di area yang rawan dengan pelanggran, maka dengan melihat dari Strengths-Threats yaitu Petugas yang memiliki wewenang dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan luas nya area Pasar Segiri serta pesatnya pertumbuhan kendaraan di Kota Samarinda maka dengan ini Dishub Kota Samarinda dapat melakukan penjagaan yang meluas dan menyeluruh agar dapat dengan cepat menindak pelanggar parkir liar yang ada di area pasar yang rawan dengan parkir liar.

### 3. Penambahan CCTV

Pengawasan lalulintas melalui CCTV merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mengatasi pelanggaran parkir liar di Pasar Segiri. Kamera pengawas ini tidak hanya berfungsi untuk keamanan gedung, tetapi juga menjadi alat vital dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan efisien. Dengan memanfaatkan CCTV, petugas dapat memantau kondisi jalan secara real-time, mengatur alur kendaraan, hingga menindak pelanggaran tanpa harus selalu turun ke lapangan. Ini Sejalan dengan penelitian oleh Octavianus (2024).

Tentang Efektivitas CCTV dan Teknologi Pengawasan Tidak Langsung Dalam Meningkatkan Keamanan Lalu Lintas, yang menyatakan bahwa Teknologi pengawasan lalu lintas berbasis CCTV dan sistem pemantauan tidak langsung telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keamanan lalu lintas. Dengan kemampuannya untuk merekam aktivitas secara real-time dan memberikan data yang akurat, teknologi ini membantu mencegah pelanggaran dan mempercepat respons terhadap insiden. Namun, efektivitas teknologi CCTV ini sangat bergantung pada beberapa faktor. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti kualitas kamera yang buruk atau cakupan wilayah yang terbatas, dapat mengurangi fungsi pengawasan. Ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Fajarudin (2024).

Tentang Penerapan Inovasi Teknologi Modern dalam Deteksi dan Pencegahan Kejahatan Lalu Lintas di Era Digital: Studi Kasus mengenai Efektivitas Sistem CCTV yang Terintegrasi dalam Menjamin Keselamatan Jalan Raya, yang menyatakan bahwa adapun manfaat yang bisa diperoleh dari

penerapan teknologi modern ini diantaranya adalah meningkatkan efisiensi proses penegakan hukum, memfasilitasi pemantauan lalu lintas secara real-time, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas, dan membantu dalam identifikasi serta penangkapan pelaku kejadian lalu lintas. Namun, implementasi teknologi ini bukan tanpa tantangan yaitu Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teknologi ini antara lain adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Penggunaan sistem elektronik CCTV sangat bermanfaat dan berpengaruh dalam pengawasan kegiatan berlalulintas terutama parkir, dengan memanfaatkan CCTV Dinas Perhubungan dapat dengan mudah mengetahui permasalahan lalu lintas yang terjadi di kawasan Pasar Segiri, namun untuk saat ini Pasar Segiri Samarinda hanya memiliki dua CCTV yang dipasang pada depan area pasar tepatnya pada Jalan Pahlawan sedangkan area yang perlu diawasi cukup luas maka dari itu dengan memanfaatkan *Strengths-Opportunity* yaitu yang dimana Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang memiliki kekuatan dalam mengakses CCTV dan tersedianya CCTV di Pasar Segiri dengan ini dishub dapat menambah unit CCTV yang dapat di pasang pada Jalan Perniagaan dan lahan parkir baru di belakang pasar agar pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

#### 4. Pembangunan Gedung parkir

Gedung parkir memiliki manfaat utama sebagai solusi efisien terhadap keterbatasan lahan dan masalah lalu lintas di perkotaan, karena dapat memaksimalkan kapasitas tampung kendaraan secara vertikal di area pusat kegiatan yang padat. Selain itu, gedung parkir yang terorganisir juga secara signifikan mengurangi kemacetan yang diakibatkan oleh kendaraan yang mencari tempat parkir di jalan, meningkatkan keamanan kendaraan dengan sistem pengawasan terpusat, serta mendukung optimalisasi fungsi jalan sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar dan tertib. Dengan tersedianya lahan parkir baru di belakang Pasar Segiri dapat dimanfaatkan dengan membangun gedung parkir. Ini Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Muharani (2018), tentang gedung parkir di kawasan gajah mada yang dimana pada penelitian ini dijelaskan bahwa perancangan gedung parkir di kawasan Gajah Mada ditujukan untuk mengatasi kemacetan yang ada di kawasan Gajah Mada khususnya di sekitar jalan siam dalam radius 100m<sup>2</sup>. Permasalahan kemacetan ini diakibatkan karena kendaraan yang parkir sembarangan serta Kurangnya lahan parkir sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan gedung parkir merupakan suatu upaya untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir dan menghilangkan parkir liar di badan jalan, yang sering menjadi penyebab utama kemacetan di sekitar area pasar. Pasar Segiri memiliki area yang luas namun minim lahan parkir maka dari itu dengan membangun gedung parkir dapat meminimalisir tingkat pelanggaran parkir liar yang terjadi di

kawasan Pasar Segiri.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda di kawasan Pasar Segiri, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi penertiban yang dilakukan masih belum berjalan secara optimal. Dari perspektif analisis SWOT, pada indikator kekuatan (strengths), Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebenarnya telah memiliki kewenangan hukum yang jelas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir liar, didukung oleh kerja sama lintas instansi, khususnya dengan pengelola pasar, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berupa CCTV. Namun demikian, kewenangan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, yang tercermin dari masih tingginya intensitas pelanggaran parkir liar di kawasan pasar.

Pada indikator kelemahan (weaknesses), keterbatasan jumlah petugas pengawas, lemahnya penegakan sanksi, serta minimnya ketersediaan lahan parkir menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penertiban. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk memarkir kendaraan di sembarang tempat, yang pada akhirnya mempersempit badan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas di area Pasar Segiri. Sementara itu, pada indikator peluang (opportunities), koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dan pengelola pasar dalam pengambilalihan pengelolaan parkir merupakan potensi strategis yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, pemanfaatan teknologi pengawasan serta pemberdayaan juru parkir menjadi peluang dalam menata sistem perparkiran yang lebih tertib, meskipun saat ini jumlah CCTV yang terbatas dan masih terkonsentrasi di Jalan Pahlawan menyebabkan pengawasan belum berjalan secara menyeluruh.

Adapun pada indikator ancaman (threats), luasnya kawasan Pasar Segiri, pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan, tingginya intensitas aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, serta rendahnya kesadaran pengguna jalan terhadap dampak parkir liar menjadi tantangan serius bagi Dinas Perhubungan. Ancaman tersebut diperkuat oleh fungsi kawasan pasar sebagai jalur utama mobilitas masyarakat untuk aktivitas kerja dan pendidikan, sehingga kawasan ini memiliki potensi kemacetan yang tinggi apabila parkir liar tidak ditangani secara tegas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, upaya penertiban parkir liar yang telah dilakukan, seperti pemasangan barrier beton serta kegiatan monitoring dan pengawasan, dinilai masih kurang efektif. Pemasangan barrier belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran karena masih dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, khususnya kendaraan roda dua, untuk parkir di area terlarang. Selain itu,

pengawasan yang cenderung terfokus pada area depan pasar dan lahan parkir tertentu menyebabkan banyak titik rawan pelanggaran tidak terpantau secara optimal akibat keterbatasan jumlah petugas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain penambahan jumlah petugas pengawas, perluasan area penjagaan, peningkatan jumlah dan cakupan unit CCTV, serta pembangunan gedung parkir sebagai solusi jangka panjang. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penertiban parkir liar, mengurangi kemacetan, serta mendukung terciptanya ketertiban dan kenyamanan lalu lintas di kawasan Pasar Segiri Kota Samarinda secara berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, dengan ini penulis memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa strategi yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda kurang efektif dan masih terdapat beberapa celah bagi masyarakat untuk parkir sembarangan, maka dari itu diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat melakukan peningkatan pengawasan secara menyeluruh di sekitar Pasar Segiri, bukan hanya di depan area pasar namun juga melakukan pengawasan di lokasi-lokasi yang rawan akan pelanggaran parkir liar.
2. terbatasnya anggota Dinas Perhubungan yang tersedia mengakibatkan sulitnya upaya penertiban parkir liar di Pasar Segiri. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kota Samarinda diharapkan dapat menambah personel yang melakukan pengawasan di area pasar
3. Dari hasil penelitian yang diteliti dapat diketahui bahwa Pasar Segiri memiliki lahan parkir yang terbatas maka dari itu diharapkan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat memaksimalkan lahan parkir terbaru dengan membangun gedung parkir untuk menambah kapasitas lahan parkir yang tersedia.

### **Daftar Pustaka**

- Afifi, R. F. (2024). Strategi dinas perhubungan dalam penertiban parkir di kota wisata Bukittinggi. *Journal of Public Administration Studies* 3(3).
- Atik, & Ratminto. (2005). *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Pustaka Pelajar.
- Amir,T. (2011). *Manajemen Strategik*. Rajawali Pers
- Cipta, H., & Hatamar (2020). *Analisis SWOT integrasi industri halal dan perbankan syariah di Indonesia*. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
- Diatprasojo, H. (2018). *Managemen strategi* . UNY Press
- Erika, P. (2024). Strategi penataan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi di wilayah Bekasi Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*

- Handayani, A. & Sarwono, E. A. (2021). *Managemen strategis*. Unsri Press
- Hardani, Adriani, A., & Ustiawaty, Jumari. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Hermawan, S. & Sriyomo. (2020) *Managemen strategi & resiko*. UMSIDA Press
- Hikmah , W. F. & Rudiadi. (2024). peran dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani parkir liar berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum. *Journal of Sharia and Law*. 3(4).
- Iksan, N. A. & Malik, I. (2023). Kolaborasi organisasi pemerintah dalam penertiban parkir liar di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*. 9(3).
- Imran, A. A. (2016) Implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum gajah mada oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*
- Jamiat, Ninggih, & Saliro. (2023) Faktor-Faktor mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengelolaan parkir di Kota Sambas. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*
- Kosim, Herman, M., & Malawat, S. H. (2021). Strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin.
- Loina. (2001). *Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik Dengan Publik*. prCV Lakolo.
- Munadi, A. & Budiman, A. (2024). kinerja dinas perhubungan dalam penertiban parkir liar di Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Studi Kasus di Pasar Induk Amuntai dan Pasar Unggas). *Jurnal Managemen Sumber Daya Manusia*. 1(3).
- Nisak, Z. (2013). Analisis swot untuk menentukan strategi kompetitif. *Jurnal Ekbis* , 9(2), 468-476
- Peraturan waliKota Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas peraturan waliKota Samarinda nomor 27 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.
- Peraturan daerah Kota Samarinda nomor 5 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan penataan parkir
- Ramadhan, R. (2024). Effektivitas penertiban parkir liar Kota Surabaya berdasarkan perda nomor 3 tahun 2018. *Jurnal Penelitian Hukum*. 4(1).
- Rusnaedi. (2022) Strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Kota Watampone Kabupaten Bone. *Economic and digital business review*, 3(2)
- Sahrir, H. S. (2022). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia
- Seno, B.S. (2020). Persepsi dan sikap masyarakat tentang keberadaan parkir liar (studi pengguna parkir disekitar pusat perbelanjaan Mall Samarinda Central Plaza (SCP). *eJournal Sosial* 8(4)
- Sitorus, B. (2023). Persepsi masyarakat terhadap parkir liar dan penataan parkir di Kabupaten/Kota Bekasi. *Journal of Road Safety*. 11(2).

- Sudiantini, A.(2022). *Managemen Strategi*. CV Pena Persada
- Syamel, S. S. & Mahsyar, A. (2020). koordinasi dinas perhubungan dengan satuan polisi pamong praja dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. *Journal of Public Policy and Management*. 2.(1).
- Syamel, S. S. & Mahsyar, A. (2020). koordinasi dinas perhubungan dengan satuan polisi pamong praja dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. *Journal of Public Policy and Management*. 2.(1)
- Tanujaya, C. (2017) Perancangan standart operational *procedure* produksi pada perusahaan coffeeein. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*.
- Tranggono, Jaelani, O. S. & Rohmadhoni, S. I. (2023) Pelanggaran hukum retribusi parkir dalam praktik pungutan parkir ilegal di Indomaret. Rungkutsurabaya. *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(1) .
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
- Waliddin, W., Saifullah., & Tarbani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press
- Widyastuti, A. R. (2018). Studi tentang pengelolaan dan penataan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 6 (3)
- Winagun, I. B. (2022). Pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Saraswati*. 4(2). Diakses dari <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/5946/4531>
- Yamboya, F. (2020). Analisis SWOT sebagai strategi Dinas Perhubungan dalam menaggulangi parkir liar di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke. *Jurnal Manajemen & bisnis*. 8(2) , 5-70.
- Yusuf, A. Amanda, B. F., & Susilowati, A. (2020). Analisis strategi keunggulan bersaing dengan pendekatan analisis swot dan metode QSPM (studi kasus murbay konveksi). *Jurnal Syntax Admiration* 1(3).